

Memahami Konflik Sosial Berbau SARA¹

Oleh Mukhtar Sarman²

Tanggal 04 November 2016, ratusan ribu umat Islam dari berbagai daerah di Indonesia "ngluruk" ke Jakarta, dengan hati panas dan tangan terkepal berunjuk rasa, berpartisipasi untuk menunjukkan aksi marah kolektif kepada Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dituduh menista agama (Islam). Aksi serupa, dengan berbagai varian unjuk rasa, juga terjadi di sejumlah daerah (*Kompas*, 5/11/2016), termasuk di Kota Banjarmasin (*Banjarmasin Post*, 5/11/2016). Tetapi isu utama dari segala macam unjuk rasa itu memberi pesan yang jelas, bahwa massa menuntut penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta non-aktif tersebut.

Terlepas dari kontroversi yang melatarbelakangi "kasus Ahok" itu, apakah dia benar melakukan penistaan agama Islam atau cuma fitnah dari lawan politiknya, sebenarnya secara kasat mata ada hal yang ganjil yang telah terperagakan. Apakah Ahok itu sedemikian "sakti", sehingga dibutuhkan ratusan ribu orang untuk berunjuk rasa, hanya sekedar untuk mendesak aparat hukum, agar Gubernur DKI itu dihukum seberat-beratnya, karena dituduh menista agama? Begitu besarkah aura figur Ahok, sehingga pidatonya di depan warga masyarakat di pulau Kepulauan Seribu mampu menggoyang pilar-pilar kehidupan bernegara, yang selama ini dipercaya telah dibangun di atas fondasi toleransi atas kemajemukan bangsa? Kalau kita amati dengan seksama, agaknya persoalan mendasar yang terjadi di DKI Jakarta akhir tahun 2016 itu tidaklah seperti itu.

"Kasus Ahok", nampaknya hanya satu bentuk aksi yang menunjukkan adanya potensi konflik sosial yang ada dalam masyarakat. Tetapi fenomenanya adalah masalah laten bangsa Indonesia, yakni adanya "kecurigaan" atas entitas pihak lainnya (yang dianggap *liyan*). Dengan kata lain, bangsa Indonesia jelas belum selesai menangani isu yang berkaitan dengan sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) dalam interaksi sosialnya.

Sesuatu gejala laten niscaya tetap akan mengendap begitu saja di bawah sadar kehidupan sosial bangsa ini. Untuk membangkitkannya dibutuhkan faktor pemicu, dan salah satu faktor pemicu bangkitnya "ancaman laten" tersebut antara lain adalah kontestasi politik. Diakui atau tidak, "kasus Ahok" itu sedikit banyak berkaitan dengan momen Pilkada (pemilihan kepala daerah) DKI Jakarta. Karena seperti ditulis dalam opini *Tempo* (27 November 2016), sulit dipercaya motif pendemo hanya semata karena tersinggung oleh ucapan Ahok.

Adanya isu SARA dalam kampanye politik Pilkada adalah merupakan indikasi bahwa kontestasi Pilkada masih belum beranjak dari struktur

¹ Pengantar diskusi "Refleksi Awal Tahun 2017", yang diselenggarakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Selatan pada tanggal 6 Januari 2017 di Banjarmasin.

² **Mukhtar Sarman** adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lambung Mangkurat.

tribalisme. Karena fenomena itu merupakan realitas politik yang terperagakan, nampaknya hal itu tidak terantisipasi dengan baik dalam aturan perundang-undangan yang dibuat, dan boleh jadi hal itu juga tidak disadari oleh para perancang undang-undang. Padahal kalau kita merujuk pada Anthony Reid,³ adanya isu SARA dan adanya semangat untuk menghidup-hidupkan kembali perbedaan sosial tersebut, sebenarnya hanya menjustifikasi kategori-kategori yang (pernah) dipaksakan oleh para penguasa di jaman kolonial dulu.

Tetapi seperti ditengarai oleh Li,⁴ memang ada sifat politik untuk pembentukan kelompok di mana identitas suku (dan agama) jelas ditemukan hari ini. Masalahnya, aspirasi dan artikulasi identitas masyarakat adat yang muncul tidak autentik dan oportunistik yang akibatnya hanya menimbulkan penghinaan resmi atau berbuah sanksi. Stigma bisa muncul dalam wacana publik. Apabila stigma itu sengaja dimunculkan dengan niat memberikan pencitraan negatif terhadap lawan politik tertentu, hal itu jelas manipulatif dan berbahaya terhadap perkembangan demokrasi. Bahwa adanya asal-usul keturunan yang berbeda, termasuk perbedaan agama, adalah realitas yang tidak bisa diingkari, dan tidaklah mungkin disembunyikan, tetapi juga tidak sepatutnya untuk dijadikan komoditas politik. Rakyat yang anonim tidak pantas digiring pada wacana yang membingungkan — sebagaimana “apa yang dianggap ada” oleh para elit — sedangkan realitas yang sebenarnya tidaklah demikian adanya. Meskipun setiap wacana politik itu tetap terbuka untuk modifikasi atau transformasi oleh kegiatan diskursif, interpretatif, dan praktik aktor tertentu, tetapi wacana yang sudah ‘teruji’ belum tentu sah. Karena dunia sosial bukan sekadar saling pertemuan dangkal atas observasi-observasi reguler. Ada persoalan substantif yang menyebabkan dunia sosial itu diceritakan sebagai entitas “apa yang ada”, dan hal itu mestinya tidak dimanipulasi oleh aktor semata untuk kepentingan politik.

Dengan kata lain, barangkali sentimen SARA dalam realitasnya tidaklah cukup signifikan sebagai faktor penyebab konflik sosial dalam masyarakat. Namun manakala isu SARA dibumbui dengan tafsir-tafsir baru yang *banal* (dangkal), boleh jadi ia dapat menjadi faktor sebab munculnya kemarahan-kemarahan massa yang terperangkap dalam banalitas pemikiran yang menyesatkan, dan lalu ingin menumpahkan kemarahan itu pada obyek atau sasaran tertentu. Dalam politik, massa yang salah kaprah memahami sesuatu paham atau pemikiran tidak bisa dipersalahkan. Yang salah, dan biasanya tidak mengakui bahwa dia adalah pihak yang bersalah, adalah para elit yang bergumul dalam rebutan kekuasaan atau pengaruh, baik itu kekuasaan di bidang politik, ekonomi, budaya, atau yang lainnya. Karena setiap segmentasi sosial itu niscaya ada kelompok elitnya.***

³ Lihat Anthony Reid, 2010. *Imperial Alchemy: Nationalism and Political Identity in Southeast Asia*. (Cambridge University Press, Cambridge), halaman 25, dan 32-34.

⁴ Lihat Tania Murray Li, 2000. “Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot”. *Comparative Studies in Society and History*, Vol. 42, No.1. (Jan, 2000), pp. 149-179. (Cambridge University Press, Cambridge).